

# Tantangan Strategis Peran Bagian Otonomi Daerah Setelah Berlakunya UU Keistimewaan DIY



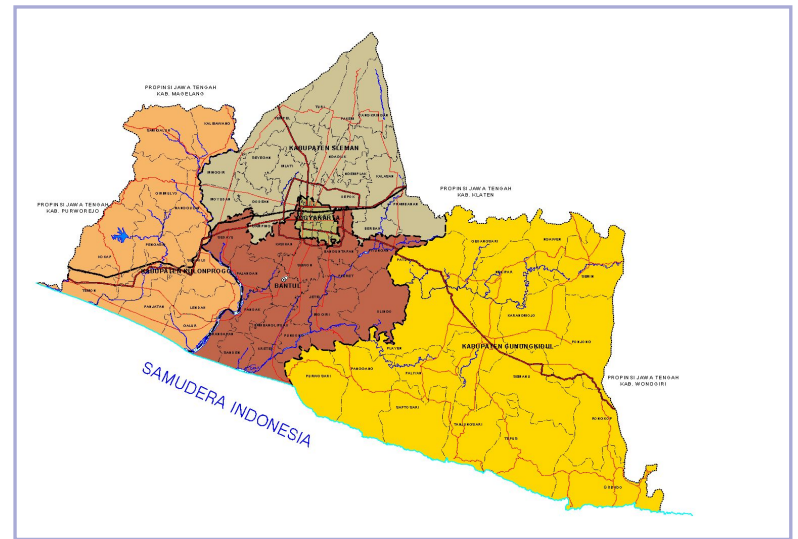
**Wahyudi Kumorotomo, PhD  
Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada**

**27 September 2013**

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

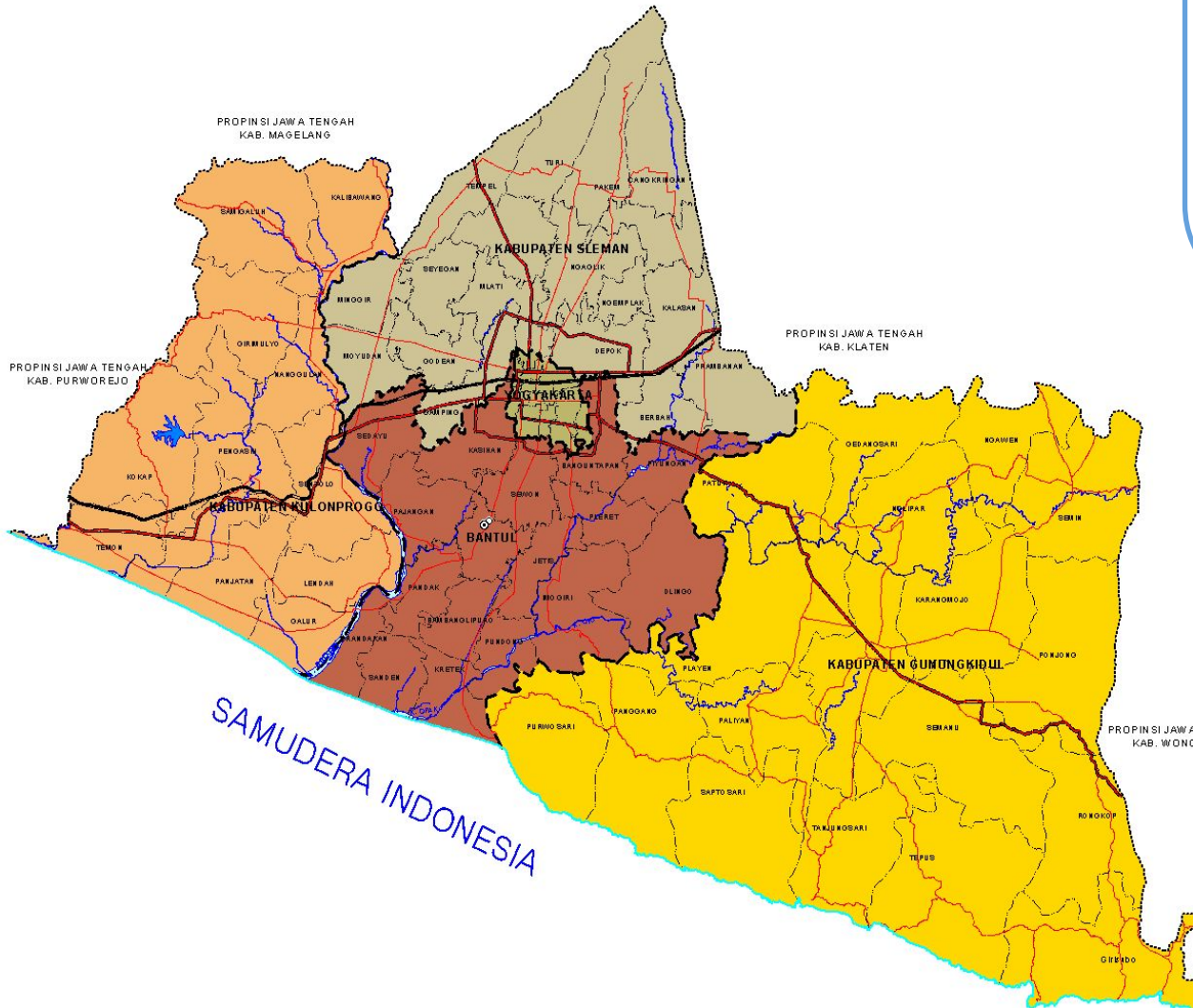
081 328 488 444

# Agenda



1. Kondisi umum DIY
2. Otonomi Daerah Setelah UU No. 13/2012
3. Mengisi Keistimewaan Daerah
4. Tantangan Strategis Bag Otonomi Daerah

# KONDISI & RENCANA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH



- Luas wilayah 3.185,80 Km<sup>2</sup>
- Terdiri dari 1 Kota dan 4 Kabupaten, 78 Kecamatan, 438 Kelurahan/Desa, 4.514 dusun
- Jumlah penduduk 3,45 juta jiwa dengan jumlah KK lebih kurang 1,07 juta

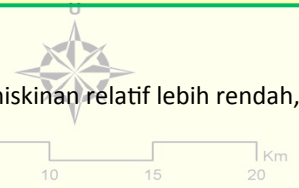
- ✓ **Kebutuhan dasar: air bersih, penanganan limbah, sampah, drainasi, perumahan, pemukiman, dan energi,**
- ✓ **Kebutuhan Sarpras pendukung sektor strategis :**
- pendidikan,
  - pariwisata,
  - kebudayaan,
  - kesehatan,
  - pertanian.

1. IPM relatif tinggi
2. Angka Harapan Hidup Sedang
3. Pertumbuhan Ekonomi relatif tinggi, kemiskinan relatif lebih rendah, tingkat pengangguran relatif tinggi
4. Sektor Dominan : jasa

Pengembangan Sektor non pertanian (perdagangan, jasa, industri, transportasi & pariwisata)

1. IPM relatif tinggi
2. Angka Harapan Hidup Tinggi
3. Pertumbuhan Ekonomi relatif tinggi, kemiskinan relatif lebih rendah, tingkat pengangguran relatif tinggi
4. Sektor Dominan : Perdagangan & jasa
5. Kawasan Resapan Air
6. Rawan Bahaya Gunung Merapi

1. Pengembangan Sektor Non Pertanian (permukiman & industri)
2. Pengembangan Sektor Perdagangan
3. Pengembangan Komoditi Hortikultura & Perkebunan
4. Pengembangan Sektor Pertanian Lahan Kering, Perkebunan dan Hortikultura
5. Pengembangan kluster-kluster industri kecil dan agribisnis di pedesaan,



KABUPATEN KULON PROGO

KABUPATEN SLEMAN

KOTA YOGYAKARTA

KABUPATEN BANTUL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**Semangat : "Dari Among Tani ke Dagang Layar"**

1. IPM relatif sedang
2. Angka Harapan Hidup Tinggi
3. Pertumbuhan Ekonomi rendah, kemiskinan tinggi, tingkat pengangguran relatif rendah
4. Sektor Dominan : pertanian
5. Rawan Longsor, Banjir dan Erosi

1. Pengembangan kluster-kluster industri kecil dan agribisnis di pedesaan,
2. Pengembangan sektor perkebunan, hortikultura & perkebunan
3. Pengembangan sektor pertanian Tanaman Pangan, Perikanan (darat & laut)
4. Pengembangan industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan

1. IPM relatif sedang
2. Angka Harapan Hidup Rendah
3. Pertumbuhan Ekonomi relatif tinggi, kemiskinan sedang, pengangguran sedang.
4. Sektor Dominan : pertanian
5. Rawan Bencana gempa Bumi & tsunami

1. Pengembangan kluster-kluster industri kecil dan agribisnis di pedesaan,
2. Pengembangan sektor pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah, Hortikultura (sayuran) & Pariwisata
3. Pengembangan industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan

1. IPM relatif rendah
2. Angka Harapan Hidup Rendah
3. Pertumbuhan Ekonomi rendah, kemiskinan tinggi, tingkat pengangguran relatif rendah
4. Sektor Dominan : pertanian
5. Rawan Longsor & Kekeringan

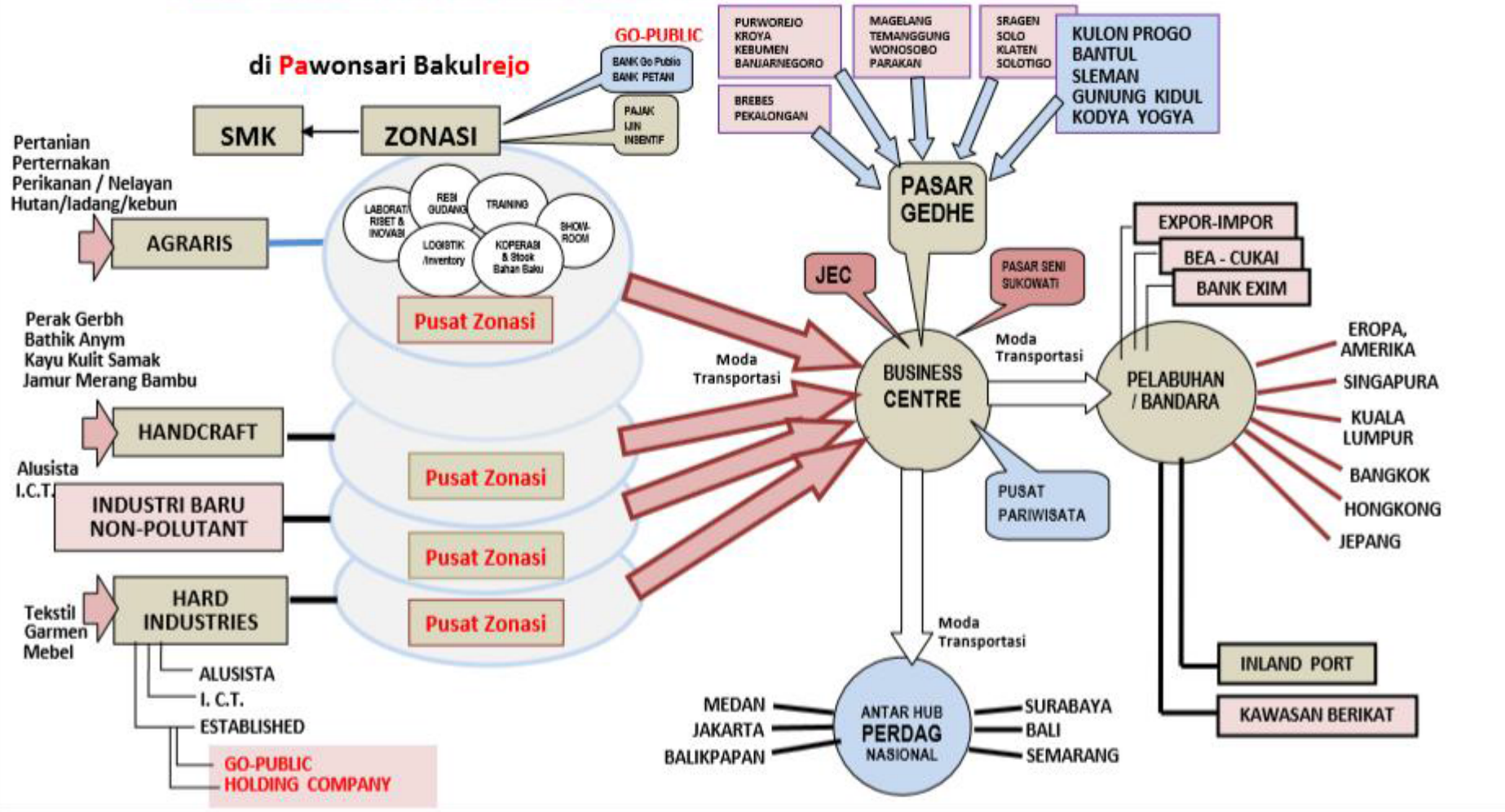
1. Pengembangan kluster-kluster industri kecil dan agribisnis di pedesaan,
2. Pengembangan Sektor Pertanian Lahan Kering, & Peternakan
3. Pengembangan industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan



# PERTUMBUHAN SISTEM MARITIM AGRARIS NIAGA DIY MENUJU KEISTIMEWAAN D.I.Y

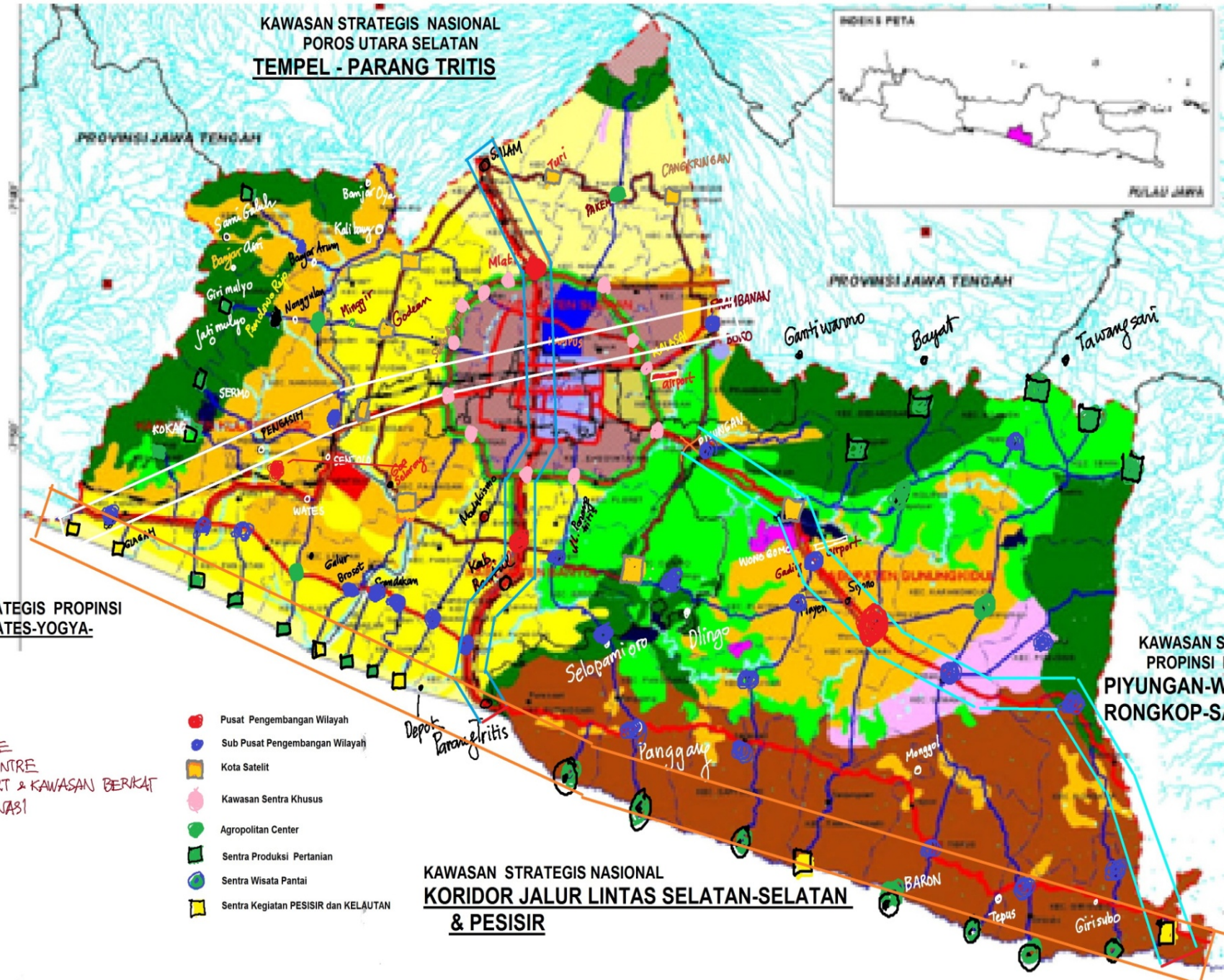
DEWAN EKONOMI & BISNIS DIY

Sistem Ekonomi SUPPLY-CHAIN daerah PAWONSARI BAKULREJO





**KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
POROS UTARA SELATAN  
TEMPEL - PARANG TRITIS**



**KAWASAN STRATEGIS PROPINSI  
KORIDOR TEMON-WATES-YOGYA-  
PRAMBANAN**

**KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
KORIDOR JALUR LINTAS SELATAN-SELATAN  
& PESISIR**

**KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
KORIDOR JALUR LINTAS SELATAN-SELATAN  
& PESISIR**

# Pembangunan Kawasan Selatan : “Dari Among Tani ke Dagang Layar”



## Penyampaian Visi Calon Gubernur DIY “YOGYAKARTA MENYONGSONG PERADABAN BARU”

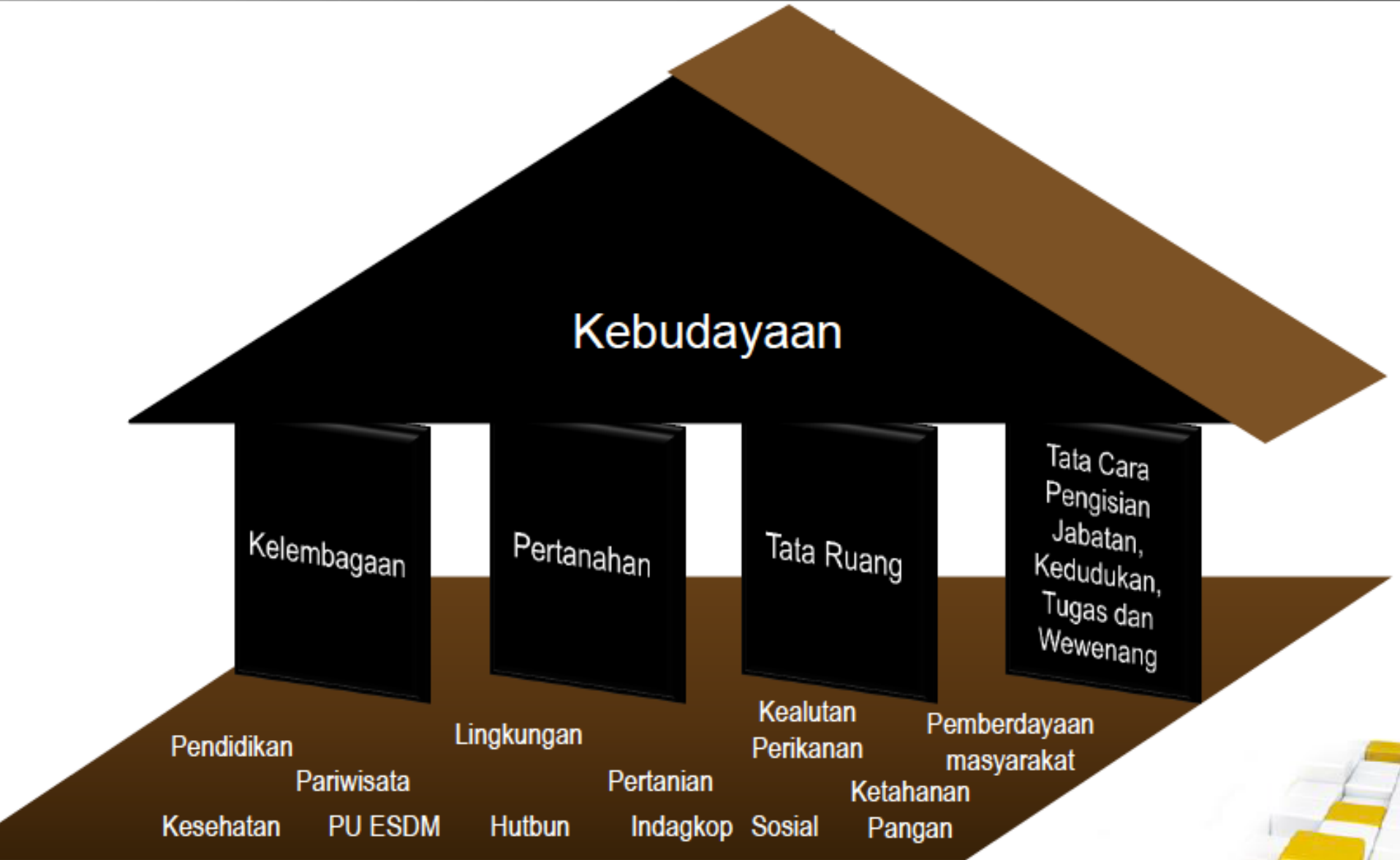
..... Maka, mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari wilayah Pantura ke Pantai Selatan (Pansel) dengan berkembangnya klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan, menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan

# Pengisian Urusan Keistimewaan UU No.13/2012

1. Tata-cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Kelembagaan Pemda DIY
3. Kebudayaan
4. Pertanahan
5. Tata-ruang.



# Keistimewaan DIY



# Usulan Dana Keistimewaan Th 2013

No	Urusan	Usulan Awal 2013	+/- Pembahasan	Hasil Akhir Usulan 2013
1.	Kebudayaan	459.896.360.420	(245.784.849.420)	214.111.511.000
2.	Pertanahan	40.652.937.500	(34.352.937.500)	6.300.000.000
3.	Kelembagaan	3.022.735.750	(506.593.250)	2.516.142.500
4.	Tata Ruang	31.642.000.000	(21.612.000.000)	10.030.000.000
	TOTAL	535.214.033.670	(303.821.380.170)	231.392.653.500

# Keistimewaan Gubernur DIY

1. Dilakukan dengan penetapan, bukan pemilihan. ( Ps 24 ayat (4)
2. Gubernur adalah Sultan yang bertahta dan Wagub adalah Adipati Paku Alam yang bertahta.(Ps 18 ayat(1) huruf c.
3. Masa jabt Gub dan Wagub selama 5 tahun sejak pelantikan ( Ps 25 ayat (1) . Dan tidak terikat masa 2 X priodisasi ( Ps 25 ayat (2)
4. Pelantikan Gub dan atau Wagub dilakukan oleh Presiden , Ps 27 ayat (1). Dalam hal Pres berhalangan dilantik oleh Wapres ( 2 ). Dalam hal Pres & Wkl Pres berhalangan dilakukan oleh Mendagri (3). Perpres No. 85/2012 berisi tentang Pelantikan Gubernur DIY, apabila yang melantik Presiden atau Wakil Presiden tidak dalam sidang Paripurna Istimewa
5. Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bukan berasal dari Partai Politik



# KEBUDAYAAN

- Kewenangan kebudayaan diselenggarakan utk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa , karsa dan karya yg berupa nilai – nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yg mengakar dalam masy DIY.

# PERTANAHAN

1. Kasultanan dan Kadipaten PA dengan UU ini dinyatakan sebagai Badan Hukum. Ps 32 ayat (1) dan merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik ( Ps 32 ayat (2)).
2. Tanah kasultanan dan Kadipaten meliputi tanah Keprabon dan bukan tanah keprabon.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah kasultanan dan Kadipaten ditujukan sebesar besarnya utk pengemb kebud, kepentingan sosial, kesejahteraan masy.
4. Kewenangan Tata ruang terbatas pada pengl dan pemanfaatan tanah kasultanan dan Kadipaten. Ps 34 ayat (1)
5. Pengaturan Tata ruang disesuaikan dengan tata ruang Nasional dan DIY. Pasal 34 ayat (3).

# TATA RUANG

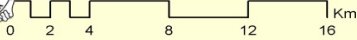
- Kewenangan Tata ruang terbatas pada pengl dan pemanfaatan tanah kasultanan dan Kadipaten. Pasal 34 ayat (1)
- Pengaturan Tata ruang disesuaikan dengan tata ruang Nasional dan DIY. Pasal 34 ayat (3).



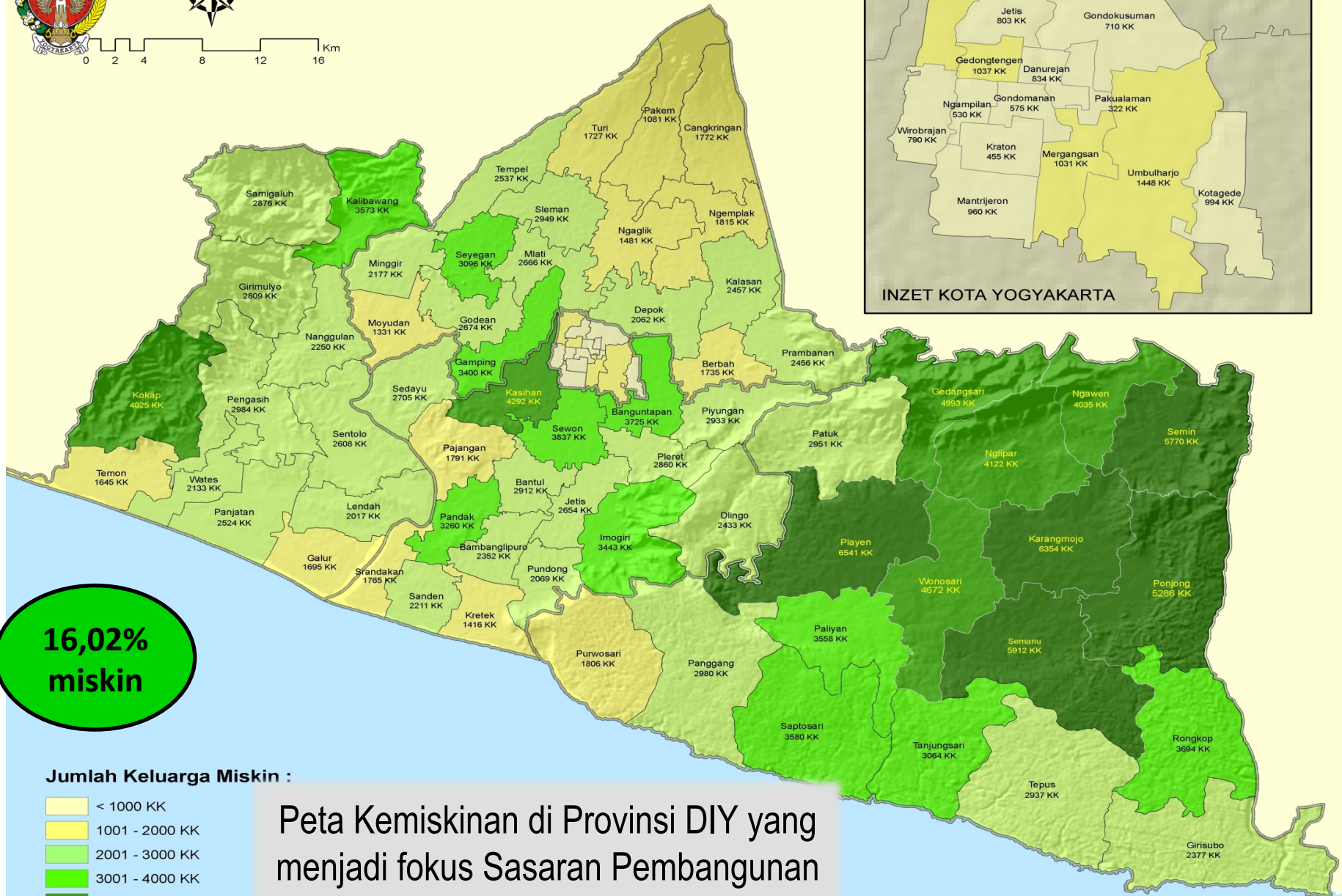
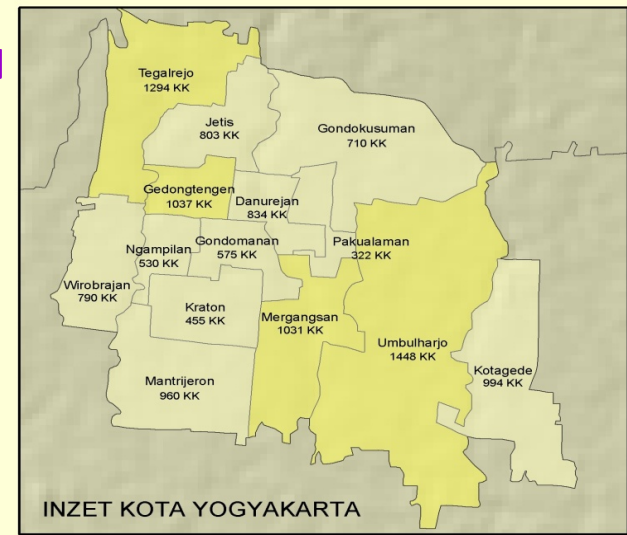






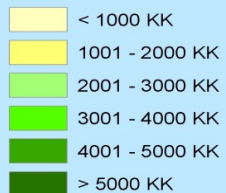


# MASIH BANYAK KANTONG KEMISKINAN



**16,02% miskin**

Jumlah Keluarga Miskin :



Peta Kemiskinan di Provinsi DIY yang menjadi fokus Sasaran Pembangunan Lintas Sektor 2013



# **Contoh Isu Strategis: Perumahan**

- 1. Kemiskinan masih tinggi (16,2%), tersebar diseluruh Kabupaten/Kota**
- 2. Secara administratif lahan terbatas (menjadi mahal), sulit mencari lahan untuk Masy Berpendapatan Rendah (MBR), dan secara geologis berada di daerah rawan bencana (Di DIY terdapat 3.558 PNS dan 44.942 KK MBR belum punya rumah)**
- 3. Teridentifikasi ada 69 kawasan (107 titik) kumuh yang harus ditangani bukan hanya rumahnya namun juga Prasarana dan Sarana Umum dan lingkungannya**
- 4. Rumah tak layak huni (RTLH) teridentifikasi masih cukup banyak (91.200 unit tahun 2011, penanganan baru mampu sekitar 2.500 unit /tahun melalui dana APBN +APBD)**
- 5. RP3KP belum menjadi produk hukum, di Kab/Kota masih ada yang belum menyusun**
- 6. Belum ada kelembagaan yang kuat di kabupaten/ Kota terkait PKP.**

# ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN HORIZONTAL DAN VERTIKAL DIY

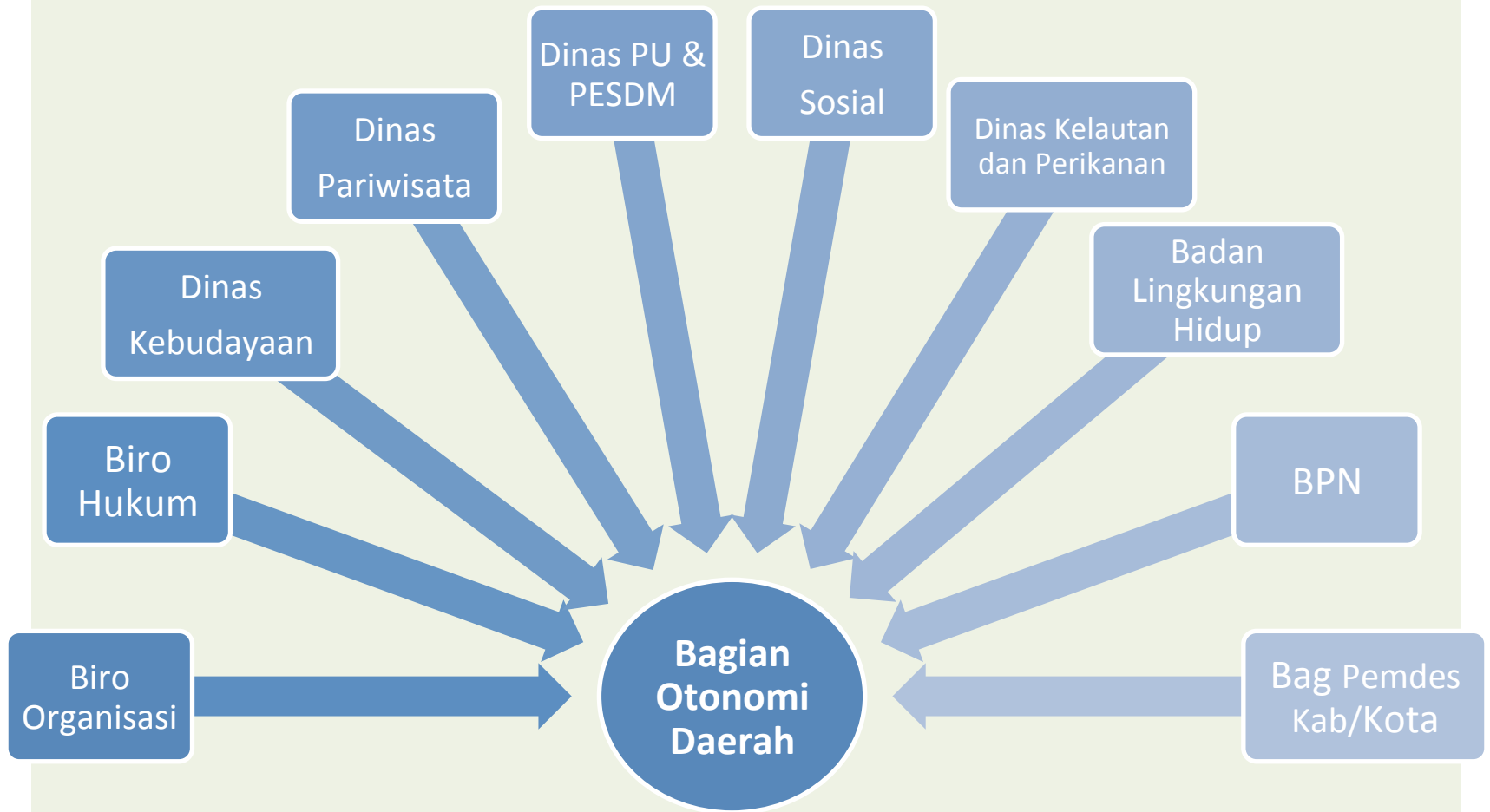
NO	KABUPATEN	KECAMATAN			
		HORIZONTAL		VERTIKAL	
1.	BANTUL	Sedayu		Pajangan Kasih Banguntapan Piyungan	
2.	KULONPROGO	Kalibawang Nanggulan Girimulyo Pengasih	Sentolo Panjatan Lendah	Kalibawang Nanggulan Sentolo Lendah	Pengasih Kokap Wates
3.	GUNUNGKIDUL	Wonosari Playen Ngawen Semin Nglipar	Gedangsari Semanu Patuk Nglipar Paliyan	Wonosari Playen Semanu Karangmojo	
4.	SLEMAN	Prambanan		Kalasan Depok Mlati Sleman	Ngaglik Gamping Prambanan Godean
5.	YOGYAKARTA			Danurejan Gedongtengen Jetis	Tegalrejo Wirobrajan

# Perda Yg Relevan dg Keistimewaan

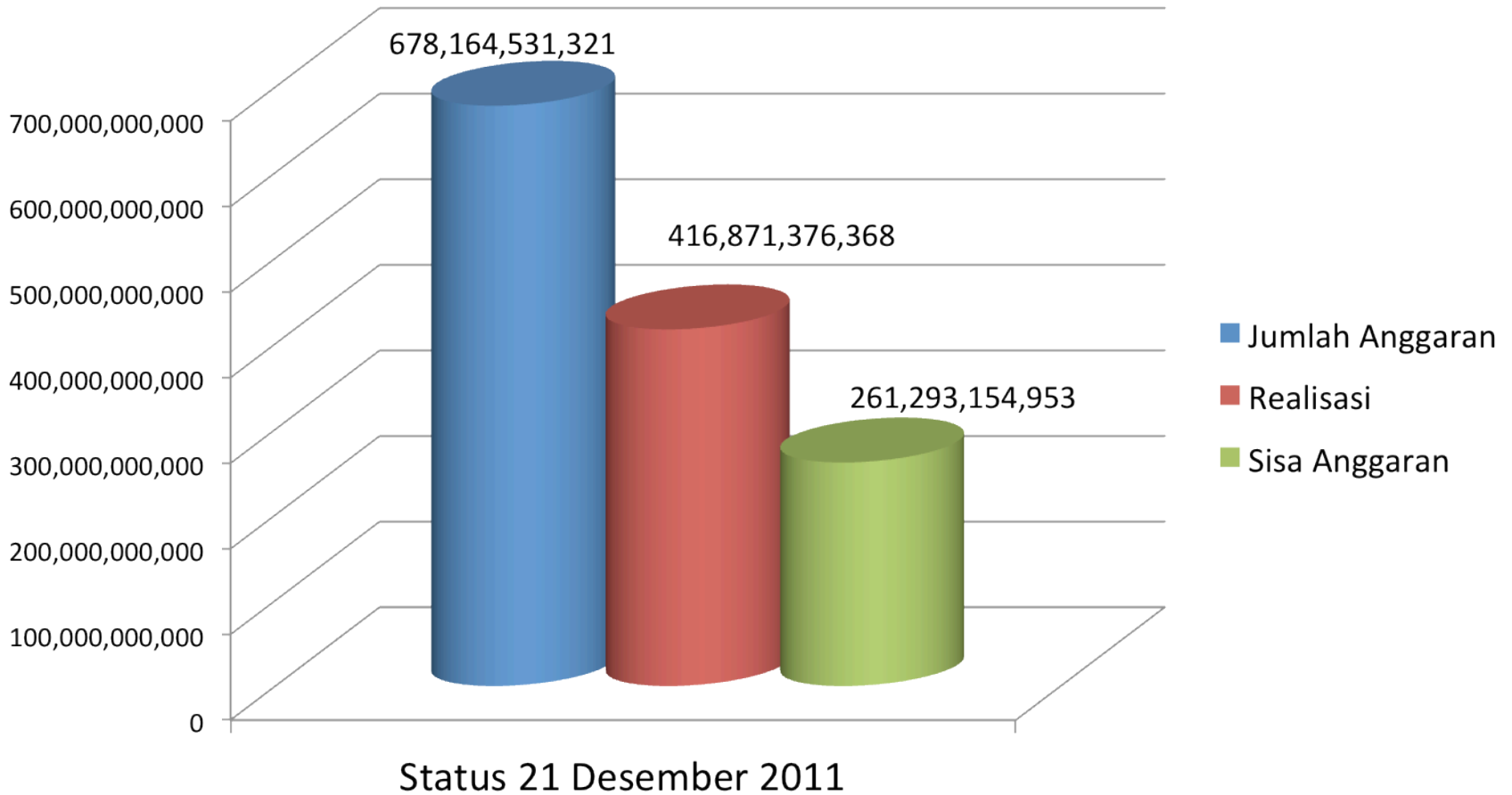
- Perda No.1/2012 ttg RIPPDA
- Perda No.6/2012 ttg Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya
- Perda No.1/2013 ttg Tata-cara Pembentukan Perdais
- Perda No.7/2013 ttg Tata-cara Pembentukan Produk Hukum Daerah & Produk Hukum DPRD  
→ Penyempurnaan Perda No.1/2011



# INSTANSI PEMERINTAH DAERAH YANG TERKAIT URUSAN OTONOMI DAERAH



# Realisasi belanja APBD DIY sangat rendah



Sumber Data : [http://intranet.jogjakarta.go.id/monev\\_apbd](http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd)

# Otonomi Daerah di Tingkat Provinsi?

## Alokasi Belanja Kurang Efektif: Contoh Monev 2012

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	% Penyelesaian Kegiatan		
		TW 1	TW 2	TW 3
215	1283	0,25	3,10	11,05
		(3 kegiatan)	(41 kegiatan)	(142 kegiatan)

Catatan Tim Monev Pemprov DIY :

1. Deviasi antara target dan realisasi (fisik & keuangan) sangat lebar, deviasi keuangan tertinggi 38,95%, Deviasi Fisik tertinggi 25,69% yang keduanya terjadi pada Triwulan III.
2. Pada Triwulan 4 harus menyelesaikan 1141 kegiatan
3. Kondisi yang demikian apakah sudah cukup baik dari sisi perencanaan?

# Tantangan Strategis Bag Otda

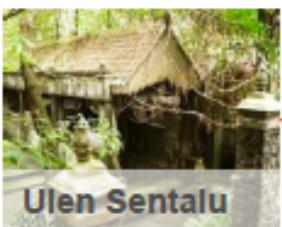
1. Perincian bidang dan urusan keistimewaan (UU 13/2012 & Rancangan Perdais); Sampai di mana?
2. Pemeringkatan SKPD dalam pelaksanaan urusan Otda → “KR Otonomi Award”?
3. Antisipasi revisi UU 32/2004, ratifikasi UU ttg pemerintahan desa.
4. Fasilitasi keistimewaan; Bgm implementasi “among tani, dagang layar”? Bagaimana kerjasama pelestarian budaya di DIY?
5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - Revisi Pergub No.4/2010
  - Pendapatan Kades & Pamong Desa, sudah sesuai UMP?
  - Bgm penerapan ps.29 PP No.72/2005 ttg pemerintahan desa?



# Daya Tarik Wisata (Budaya)



Makam Raja



Ulen Sentalu



Museum Afandi



Sendratari



Kraton Kasultanan



Puro Pakualaman



Taman Sari



Museum Kereta



Museum Sonobodoyo



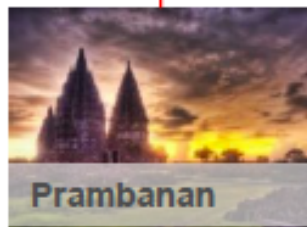
Benteng Vredeburg



Gedung Agung



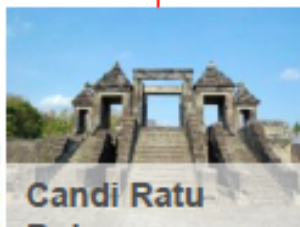
Candi Plaosan



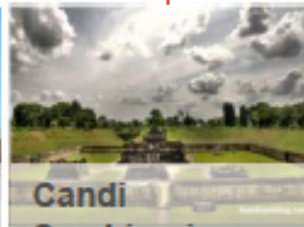
Prambanan



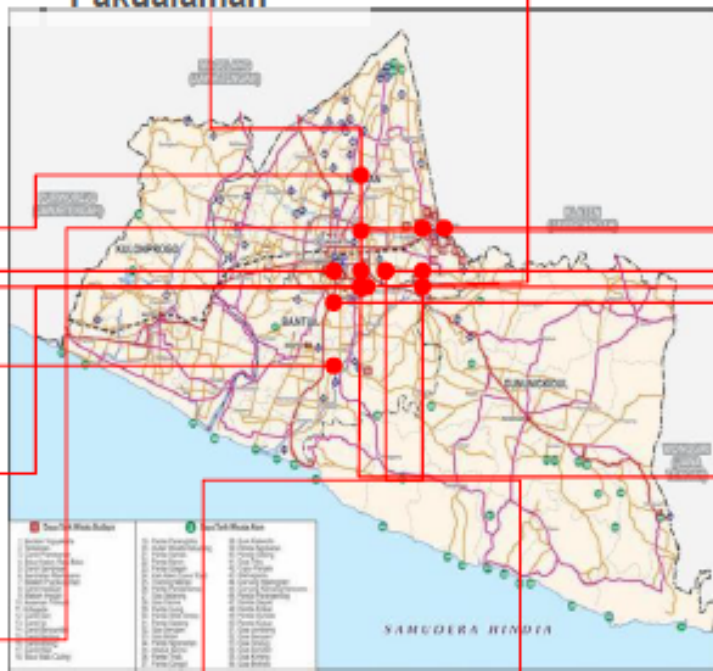
Candi Sewu



Candi Ratu Boko



Candi Sambisario



PERDA DIY  
NO 5 TAHUN 2011

PUSAT PENDIDIKAN  
BERBASIS BUDAYA  
TERKEMUKA DI ASIA  
TENGGERA 2025

Pendidikan berbasis  
budaya

PENDIDIKAN  
BERKUALITAS  
UNTUK SEMUA,  
NONDISKRIMINATIF

PENDIDIKAN KARAKTER  
BERBASIS BUDAYA  
JAWA YOGYAKARTA

PUSAT UNGGULAN  
MUTU PENDIDIKAN  
NASIONAL YG  
KOMPREHENSIF

PERAN SINERGETIK  
PENDIDIKAN DLM  
PEMBANGUNAN:  
DAERAH - NASIONAL

TATAKELOLA  
PENDIDIKAN YG BAIK  
*GOOD EDUCATION  
GOVERNANCE*

ASESMEN KEBUTUHAN  
PENYEDIAAN (SUPPLY)  
PENGATURAN  
PERMINTAAN  
(DEMAND)

IDENTIFIKASI/ANALISIS  
NILAI-BUDAYA  
PENGEMBANGAN  
MODEL PENDIDIKAN  
KARAKTER  
DIFUSI MODEL  
PENDIDIKAN KARAKTER

PENATAAN  
ORGANISASIONAL  
PENGUATAN  
KEPEMIMPINAN PEND  
PENGUATAN KAPASITAS  
MANAJEMEN INSTITUSI

PENGEMBANGAN MUTU  
AKADEMIK DAN  
NONAKADEMIK:  
A. KURIKULUM  
B. GURU PENDIDIK  
C. SARANA

PENDIDIKAN ↔  
PUSAT KEBUDAYAAN &  
PARIWISATA  
PENDIDIKAN ↔ PEMB  
EKONOMI  
PENDIDIKAN ↔ PEMB  
POLITIK

BUDAYA2 INDONESIA

BUDAYA NGAYOGYAKARTA

BUDAYA GLOBAL



terima kasih